

**SISTEM PENGUPAHAN PADA JASA FREELANCE FOTOGRAFER
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Studio Junior Picture di Bandarlampung)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

DWI JULIZAR

1421030100

Program Studi Mu'amalah

Pembimbing I: Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II: Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dihormati dan tak seorang pun dapat merampasnya.

Orang bekerja tentu saja mempunyai harapan untuk mendapat imbalan yang berupa upah dari hasil kerjanya. Upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada pekerja. Pembayaran upah haruslah disegerakan dalam memberi upah setelah buruh menyelesaikan dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh. Seperti pada sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture upah para freelance fotografer ditangguhkan sampai masa pelunasan dari pihak konsumen Studio Junior Picture.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan pada jasa freelance fotografer di Studio Junior Picture Bandar Lampung? Pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada jasa freelance fotografer di Studio Junior Picture? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan antara pemilik Studio Junior Picture Bandar Lampung kepada para freelance fotografer dan juga untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada jasa freelance fotografer di Studio Junior Picture.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis diperkaya dengan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam hal ini berjumlah 10 orang, adapun sample penelitian ini 2 orang pemilik studio dan 8 orang freelance. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara (*interview*) di Studio Junior Picture. Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data (*editing*), sistemasi data (*sistemizing*). Analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dari analisis menunjukan sistem pengupahan di Studio Junior Picture menggunakan sistem borongan, pekerjaan yang dilakukan freelance fotografer dikompensasikan berdasarkan jenis pekerjaan dan dalam satuan hari di Studio Junior Picture. Pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture belum sesuai dalam perspektif hukum Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak. pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture dengan cara menangguhkan upah freelance fotografer dianggap suatu kezaliman padahal pemilik Studio mampu memberikan gaji tepat waktu. Oleh karena itu, menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya tidaklah diperbolehkan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : SISTEM PENGUPAHAN PADA JASA FREELANCE
FOTOGRAFER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Pada Studio Junior Picture di Bandar
Lampung)**

Nama : DWI JULIZAR

NPM : 1421030100

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden-Intan Lampung.**

Pembimbing I

**Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001**

Pembimbing II

**Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.
NIP.195808171993031002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **SISTEM PENGUPAHAN PADA JASA
FREELANCE FOTOGRAFER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM** (Studi Pada Studio Junior Picture di Bandar Lampung) disusun oleh : Dwi

Julizar, NPM : 1421030100, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah, telah
diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal :

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Sekretaris Sidang : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Khairuddin, M.H.

196210221993031002

MOTTO

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)

¹Abu 'Abdullah bin Yazid al-Quzwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadits No 2537 (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005) h. 398.

PERSEMBAHAN

Bissmillahirohmaanirrohim,

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkap rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Hasanuddin dan Ibu Gustati Anwar tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat, do'a, moril serta materil. Karena tanpa do'a tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua yang telah mengantarkanku menjadi orang yang beriman, berilmu, berbudi dan bertanggung jawab. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Almamaterku tercinta Fakultas Syaria'h Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Dwi Julizar. Dilahirkan pada tanggal 29 Juli 1996 di Bandarjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Merupakan anak kedua dari buah perkawinan pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Gustati Anwar.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. TK. Al-Falah Bandarjaya dan selesai pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan
2. SD Negeri 5 Bandarjaya dan selesai pada tahun 2008. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan
3. MTS An-Nur Bandarjaya dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya Penulis melanjutkan
4. MAN 1 Poncowati dan selesai pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Negeri, yaitu pada Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem pengupahan pada jasa freelance fotografer menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus Pada Studio Junior Picture di Bandarlampung), shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada dijalannya.

Skripsi ini bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). atas terealisasi skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

4. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.selaku Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. H.A. Khumaedi Ja'far,S.Ag.,M.H., selaku Ketua Jurusan Muamalah, bapak Khoiruddin,M.S.I.,selaku Sekretaris Jurusan Muamalah dan Bapak Muslim.M.H.I.,selaku Staf Jurusan Muamalah yang telah membantu dalam melakukan pencerahan serta nasihat-nasihat yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajarkan dan juga memberikan ilmu pengetahuannya serta motivasi dan nasihat yang diberikan.
7. Pimpinan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang membantu dalam penyelesaian pelengkap skripsi ini, perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan data,refrensi dan lain-lain.
8. Pemilik Studio Junior Picture dan para freelance fotografer di Bandarlampung yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kelengkapan data dalam skripsi ini.
9. Untuk para sahabat-sahabatku Brudul Squad yaitu Rini, Pamela, Ainni, Sinta, Anggun insani, Sitha, Nizam, Indra, Dani, Anggun Destiani, Ifzan, Tian, Wira, Kiki Lucia, Dowi, Cindy, Alba, Sultan, Viky Hazmi, Fakhrudin, Oriza terima kasih telah mengisi indahny kehidupan pertemanan yang sudah kita anggap seperti saudara di kampus UIN Raden Intan Lampung, yang asal mulanya dari berbeda kelas dan akhirnya kita bisa bersatu.

10. Untuk para Teman-teman Muamalah pejuang skripsi angkatan 2014, yang saling memberi semangat. Khususnya teman-teman Muamalah F tahun 2014 teruntuk teman kelas Muamalah F Ridho, Iman, Abduh, Citra Bio, Intan, Annas, Venti yang telah mengajarkan banyak hal dan juga membantu atas segala pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern seperti saat ini.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

Dwi Julizar

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10

BAB IILANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Rukun-Rukun Akad	17
3. Syarat-Syarat Akad	19
4. Macam-Macam Akad	22
5. Berakhirnya Akad	27
6. Asas-Asas dalam Akad	27

B. Upah dalam Perspektif Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Upah.....	37
2. Dasar Hukum Upah	40
3. Rukun dan Syarat Upah	48
4. Macam-Macam Ijarah.....	53
5. Waktu Pembayaran Upah	53
6. Etika dalam Bisnis Islam	57
7. Hubungan Kerja dalam Islam	63
C. Upah Menurut Hukum Indonesia	69
1. Pengertian Upah.....	69
2. Dasar Hukum Upah	71
3. Hubungan Kerja.....	73
4. Sistem Pembayaran Upah danPengupahan.....	75
5. Cara Pembayaran Upah Menurut Perturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah	79
6. Asas-Asas Pengupahan.....	80
7. Upah Minimum.....	81

BAB III DATA LAPANGAN

A. Gambaran Singkat Studio Junior Picture	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Studio Junior Picture.....	83
2. Visi dan Misi Studio Junior Picture	84
3. Jenis Pekerjaan di Studio Junior Picture	84
4. Struktur Bagan Kerja.....	86
5. Proses Produksi Usaha Studio Junior Picture.....	87
B. Pelaksanaan Sistem Upah di Studio Junior Picture.....	88

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Sistem Pengupahan pada Jasa Freelance Fotografer
di Studio Junior Picture 94
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan
pada Freelance Fotografer di Studio Junior Picture 96

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 102
- B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 : Kartu Konsultasi
- Lampiran 4 : Surat Pengantar Riset
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“SISTEM PENGUPAHAN PADA JASA FREELANCE FOTOGRAFER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹ Sistem yang dimaksud adalah metode atau tata cara pelaksanaan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik Studio Junior Picture kepada para *freelance fotografer* Studio Junior Picture di Bandarlampung.

2. Pengupahan

Pengupahan adalah proses, cara, perbuatan memberi upah. Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti.² Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta:PT Gramedia,2011), h. 1320.

² *Ibid*, h. 1533.

jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³

3. Jasa

Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.⁴ Jasa yang diberikan oleh *freelance fotografer* adalah membantu pemilik Studio Junior Picture sebagai juru foto.

4. Freelance Fotografer

Freelance fotografer adalah seseorang yang bekerja sebagai juru foto tanpa ada ikatan kontrak yang mengikat tetap atau jangka panjang.

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang.⁵ Yang dimaksud sudut pandang skripsi ini yaitu melihat sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture dari sudut pandang hukum Islam.

6. Hukum Islam

Hukum Islam secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan *syari'ah*. Syariah adalah suatu istilah mengenai hukum yang bersumber pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan melalui

³ A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonseia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h.187.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 980.

⁵ *Ibid*, h.1062.

wahyu oleh Yang membuat hukum. Dengan demikian Hukum Islam itu adalah sekumpulan ketetapan hukum kemashlahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah meninjau dari segi hukum Islam mengenai Sistem Pengupahan Pada Jasa Freelance Fotografer Menurut Perspektif Hukum Islam di Studio Junior Picture Bandarlampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “ **SISTEM PENGUPAHAN PADA JASA FREELANCE FOTOGRAFER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” adalah :

1. Secara objektif, karena sistem pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu *musta'jir*.
2. Secara subjektif, penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang dimana kajian tentang praktik *ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu kajian dalam bidang muamalah yang dilihat dalam Perspektif Hukum Islam.

⁶ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2015), h. 11.

C. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Setiap pergaulan hidup dalam melakukan perbuatan dan hubungan dengan orang lain disebut dengan muamalah. Segala aktivitas manusia pada dasarnya tidak terlepas dari proses bermuamalah. Hal ini terutama disebabkan karena manusia adalah individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri-sendiri, maka diperlukanlah sikap tolong-menolong diantara sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 500

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong manusia hanya dibolehkan dalam kebaikan saja. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa lepas dari bermuamalah. Syariah (*Hukum Islam*) hadir untuk mengatur bagaimana seharusnya manusia itu berhubungan dengan manusia yang lain atau bermuamalah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, orang yang memiliki harta dengan cara-cara yang tidak sah akan sangat berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT diakhirat nanti.⁸

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah akad *ijarah* (sewa menyewa). Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah 'ayan* (sewa barang) dan *ijarah 'amal* (sewa jasa). Yang dimaksud dengan *ijarah 'amal* adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁹

Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dihormati dan tak seorang pun dapat merampasnya.¹⁰

⁸ Mohammad Rusfi, Filsafat Harta : *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah, IAIN RIL, Vol. XIII, No. 2, 2016), h. 239

⁹ Khumaidi Jafar, *Op.Cit*, h. 187

¹⁰ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Edisi Baru*, (Jakarta : Pustaka Fisafat, 2006), h. 162

Hak atas kerja merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup layak. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti bahwa negara mengakui dan menjamin hak atas pekerjaan sebagai hak asasi yang dimiliki setiap warga negara.¹¹

Pada ajaran Islam pun, bekerja merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah (9) Ayat 10 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu” ...¹²

Orang bekerja tentu saja mempunyai harapan untuk mendapat imbalan yang berupa upah dari hasil kerjanya. Upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada pekerja. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.

¹¹ *Ibid*, h. 163.

¹² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.162.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah melakukan pekerjaan itu selesai dikerjakan. Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusihi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja, Seperti dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْآخِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”

(H.R Ibnu Majah dari Abu Umar).¹³

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud dari hadits di atas, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu,

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.10.

haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.¹⁴

Pada masa modern ini sangat banyak orang yang bekerja sebagai fotografer, dimana teknologi dan sosial media berkembang. Bekerja menjadi seorang fotografer dapat dilakukan dengan cara mendirikan suatu perusahaan atau dengan menjadi *freelance fotografer* (pekerja harian). *freelance fotografer* adalah seorang yang bekerja tanpa ada ikatan kontrak jangka panjang pada lembaga atau perusahaan tertentu sebagai juru foto. Pekerja harian lepas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (*UUK*) Pasal 56 ayat (1) disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan KEPMEN No. 100 Tahun 2004 Tentang “ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu” adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Pekerja harian lepas atau *freelance fotografer* terdapat pada Studio Junior Picture di Bandarlampung.

Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai *mu'jir* adalah pemilik Studio Junior Picture dan pihak kedua selaku *freelance fotografer* sebagai *musta'jir*. Dalam hal ini *mu'jir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* untuk membantu pekerjaan *mu'jir* dalam foto liputan pernikahan, dengan kesepakatan upah yang telah ditentukan bersama besarannya. Pihak *mu'jir* menunda pembayaran upah atas pekerjaan yang

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zaenal Arifin (Gema Insani Press, 2001), h. 232.

telah dilakukan oleh *musta'jir* dikarenakan *mu'jir* belum menerima pelunasan atas pekerjaan dari konsumen di Studio Junior Picture, sebab masih ada tahap proses produksi yaitu editing maupun pencetakan. Namun pekerjaan yang dilakukan *musta'jir* (*freelance fotografer*) telah selesai dengan baik dalam membantu *mu'jir* dalam pekerjaannya tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan pada pengupahan *freelance fotografer* yang ada di Studio Junior Picture.

Menurut data pra-riset yang dilakukan pada salah satu pekerja *freelance fotografer* di Studio Junior Picture upah yang diberikan bisa lebih dalam 1 bulan lama pembayaran yang diberikan dalam pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam meneliti sistem pengupahan pada jasa *freelance fotografer* di Studio Junior Picture di Bandarlampung, maka penelitian ini dengan judul **“Sistem Pengupahan Pada Jasa Freelance Fotografer Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Studio Junior Picture di Bandarlampung)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pengupahan pada Jasa Freelance Fotografer di Studio Junior Picture di Bandarlampung ?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan pada Jasa Freelance Fotografer di Studio Junior Picture di Bandarlampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan pada Jasa Freelance Fotografer di Studio Junior Picture di Bandarlampung.
 - b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan pada Jasa Freelance Fotografer di Studio Junior Picture.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang mengenai konsep sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam dalam menjalankan suatu usaha.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur

penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁶ Mengingat dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber pada Studio Junior Picture di Bandarlampung.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini menggunakan pengumpulan data pada literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁷ Hal ini untuk menjadi dasar analisis dari data-data yang diperoleh dilapanagan.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin suatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu.¹⁸ Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture menurut perspektif hukum Islam.

¹⁵Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Psuat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2015), h.19.

¹⁶ *Ibid*, h. 9.

¹⁷ *Ibid*, h. 9.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia, 2009), h. 54.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik Studio Junior Picture dan para *freelance fotografer*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimaksud.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jenis dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagiannya. Dalam hal ini populasi berjumlah 10 orang yang berada di Studio Junior Picture.

Menurut Arikunto jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

¹⁹ Muhammad Pabundun Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Studio Junior Picture. Adapun sample dalam penelitian ini 2 orang pemilik Studio Junior Picture dan 8 orang *freelance fotografer* di Studio Junior Picture.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:²⁰

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²¹ Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung ke Studio Junior Picture di Bandarlampung dengan demikian memperoleh data yang baik, dan akurat. Metode ini untuk mengetahui gambaran umum tentang objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

²⁰ *Ibid*, h. 91.

²¹ Muhammad Pabundun Tika, *Op.Cit*, h. 57.

jawaban responden dicatat atau direkam.²² Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada orang yang berkompeten seperti pemilik studio junior picture dan para freelance fotografer yang bekerja yang di Studio Junior Picture. Data yang didapat merupakan hasil wawancara kepada para pihak diantaranya 8 orang freelance dan 2 pemilik studio.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian. Dokumentasi adalah “mencari dat mengenai berbagai hal yang berupa catatan, transkrip, buku majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.”²³

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi obyektif di Studio Junior Picture Bandarlampung.

5. Pengolaan Data

Setelah data dikumpulkan melalui beberapa tahapan diatas, peneliti di dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Editing (Pemeriksaan Data) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing

²² Susiadi AS, *Op.Cit*, h. 107.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta, Bina Aksara, 2007), h. 115.

adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.²⁴

- b. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah atau variabel penelitian.

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu dilakukan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang mengandung makna suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir deduktif.

²⁴ *Ibid*, h. 122.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara bahasa (etimologi) *'Aqad* memiliki beberapa arti antara lain, dari kata (الرَّبْطُ) yang berarti *mengikat*, (عَقْدَةٌ) berarti *sambungan*, (الْعَهْدُ) berarti *janji*. Istilah *'ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran : 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

Secara istilah (terminologi), yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹ Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 KHES (*kompilasi hukum ekonomi syariah*) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad dalam hukum Indonesia disebut perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda *verbinten*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum dapat berupa perbuatan seperti: jual beli, utang-piutang, upah mengupah, dan hibah. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Dalam hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut debitor.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 44

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 229.

2. Rukun-Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:³

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berkakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (*pemberian*), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk

³*Ibid*, h. 46

dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok pinjaman (*i'arah* atau *al'ariyah*) adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *Panjinmas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'Aqd* ialah:

- 1) *Sighat al-'Aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "*Aku serahkan barang ini*", kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang

lengkap ialah “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.

- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz, misalnya seorang berkata, “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “*Aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengkataan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad menurut pendapat Madzhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*) dan syarat yang batal (*bathil*) dengan penjelasan berikut ini:⁴

- a) Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara’, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*). Misalnya harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan ‘urf, dan adanya garansi.

⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 20

- b) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sahih. Misalnya, memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.
- c) Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akad tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.

Syarat pembentukan akad dibedakan menjadi: syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka adanya menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua sebagai berikut:
 - 1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat tersebut meliputi:
 - a) kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak; tidak sah orang yang berakad tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang dibawah pengampunan (*majhur*) karena boros, dan lainnya;
 - b) yang dijadikan objek akad menerima hukumnya;

- c) akad itu diizinkan oleh syariah selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang;
 - d) tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh syariah, seperti jual beli *mulasamah*;
 - e) akad dapat memberi faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah;
 - f) ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka, bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijabnya batal;
 - g) ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan (*idhafi*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.
- a) Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu: kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu,

perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (*fasid*).

- b) Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu pemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas dengan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan syariah, sedangkan kekuasaan kemampuan seseorang dalam *bertasharruf*, sesuai dengan ketetapan syariah, baik ketetapan asli yang dilakukan dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain: (1) Barang yang dijadikan objek akad itu harus miliknya orang yang berakad jika dijadikan tergantung dari izin pemiliknya yang asli. (2) Barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.
- c) Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian. Di antar syarat *luzum*(mengikat) dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* dalam jual beli, seperti *khiyar syart*, *khiyar 'aib*. Jika *luzum* tampak maka akad batal atau dikembalikan.

4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:⁵

⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.50

- a. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pembayaran akad diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. '*Aqad Mu'alaq* yaitu ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. '*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad munjiz, mu'alaq, dan mudhaf, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjaunnya. Karena adanya perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.

- a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
 - 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.

- 2) Akad *gahir musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
- 1) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
- 1) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - 2) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
- d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
- 1) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - 2) Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

- e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - 1) Akad yang harus dilakukan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - 2) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- f. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - 1) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - 2) Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta)
- g. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
 - 1) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
 - 2) Akad *tabaru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - 3) Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad mu'awadhah pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.

h. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qaradh.
- 2) Akad amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
- 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dhaman, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).

i. Tujuan akad, dari segi tujuan akad dapat dibagi menjadi lima golongan:

- 1) Berujuan *tamlík*, seperti jual beli
- 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* atau *mudharabah*.
- 3) Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiayah.
- 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:⁶

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi;
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah;
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Dalam hal ini para Ulama Fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa (*ijarah*).

6. Asas-Asas dalam Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 35.

menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁷ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁸ Mohammad Daud Ali mengartikan *asas* apabila dihubungkan dengan kata *hukum* adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁹ Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Pada hukum akad terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Adapun asas-asas perjanjian sebagai berikut:

1) Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Hadid (57) Ayat 4 :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

⁸ *Ibid*, h. 896

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 50-52

Artinya: *“Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.¹⁰

Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹¹

2) Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibadah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, *“Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”*.¹² Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ 

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.¹³

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 430.

¹¹ Muhammad Syakir Aula, *Asurasi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. Pertama, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

¹² Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqiyah*, Cet. Pertama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001) h. 12.

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 36.

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa bentuk muamalah segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

3) Asas Keadilan (*Al' Adalah*)

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hadid (57) ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*”.¹⁴

Pada ayat di atas berhubungan dengan asas ini, para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 432.

mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.¹⁵

4) Asas Persamaan dan Kestaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.¹⁶ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS Al-Hujuraat (49) ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan*

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.12.

¹⁶ *Ibid*, h. 32-33.

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.¹⁷

5) Asas Kejujuran dan Kebenaran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.¹⁸

QS.al-Ahzab (33) Ayat 70 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “*Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*”.¹⁹

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madharat* dilarang.

6) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 412.

¹⁸ *Ibid*, h. 37.

¹⁹ *Ibid*, h. 341.

tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.²⁰ Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali dan asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

7) Asas Kerelaan (*Mabda' Ar-rada'iyah*)

Firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.²¹

²⁰ M. Tamyiz Muharrom, *Kontrak kerja : Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengebangan SDM*, dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X Tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syariah FIAI UII)

²¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 375.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadist riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: “*Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)*.”²²

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

8) Asas Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan

²² Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h. 250.

kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."²³ Dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (Akad)"*.²⁴

Berdasarkan ayat ini, seorang muslim bebas melakukan perjanjian akan tetapi harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian. Ketika mereka melanggar perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian.

²³ *Ibid*, h. 249.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 84.

9) Asas Keseimbangan Prestasi

Asas keseimbangan prestasi yang dimaksudkan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

10) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir Surah Al-Isra' (17) ayat 15 :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

Artinya: “....dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.²⁵

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta : CV Rajawali, 2000), h. 115.

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi, “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.*”²⁶

B. Upah dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara bahasa (etimologi) kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*’ yang berarti *al-’iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²⁷ Menurut pengertian lain mrngatakan bahwa secara etimologi *ijrah* adalah menjual manfaat.²⁸ Sedangkan secara istilahi (terminologi) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²⁹

²⁶ Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 10.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki (PT Alma’ Arif : Bandung, 1987), h. 15.

²⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.121.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 387.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³⁰

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³¹

Menurut para fuqaha, definisi *Ijarah* antara lain sebagai berikut:³²

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

³⁰ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 180.

³¹ Khumedi Ja'far, *Loc.Cit*

³² Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 114.

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan manfaat.
7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Ijarah pada hakikatnya termasuk akad jual-beli. Perbedaannya dengan jual-beli ialah bahwa obyek akad (yang dibeli) dalam akad *ijârah* tidak berupa barang melainkan berupa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang/jasa). *‘Iwadh Ijarah* pada hakikatnya termasuk akad jual-beli.

Perbedaannya dengan jual-beli ialah bahwa obyek akad (yang dibeli) dalam akad *ijârah* tidak berupa barang melainkan berupa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang/jasa). *‘Iwadh* (imbalan) atas manfaat itu disebut *ujrah*, yang menjual disebut *mu’jir/ajir*, dan yang membeli disebut *musta’jir*.

Adapun unsur-unsur *ijarah* tersebut, dapat dipastikan bahwa akad kerjasama antara perusahaan dan pekerja atau antara majikan dan karyawan merupakan bagian daripada *ijarah*, majikan sebagai *musta’jir* dan karyawan/pekerja sebagai *ajir*. Akad kerjasama tersebut sah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, jenis pekerjaan dan waktunya jelas, dan tidak ada unsur pemerasan (*‘adamul istighlal*). Dalam hal tersebut, tidak ada perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, yakni sama-sama sah dan boleh dilakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas serta memenuhi rasa keadilan menurut Islam. Demikianlah beberapa prinsip utama yang dipenuhi dalam berbagai macam hubungan muamalah.³³

2. Dasar Hukum Upah

a. Landasan Al-Qur’an

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

³³Darwis Anatami, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing*, (al-‘Adalah, Vol 13, No.2, 2016), h. 207-208.

1) Surah Al-Baqarah (2) Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ
 الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا ۖ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”³⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pengupahan harus memberi dengan yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi

³⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 29.

tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁵

2) Surah Al-Qashas (28) Ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَبَاطُتُ أَسْتَجِرُّهُ ^ط إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجِرَّتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٌ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
 عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ط سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".³⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang ayah kepada seseorang yang bekerja kepadanya, dan menjanjikan imbalan sesuatu dengan ketentuan waktu dan manfaat yang diterima oleh

³⁵Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah Anwar Rasyidi, (Semarang : Toha Putra, 1992), h. 350.

³⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 310.

seorang ayah tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa “Berkata dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud untuk menikahkan kamu dengan puteri keduaku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu”.

3) Surah Az-Zukhruf (43) Ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.³⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kelebihan sebagai manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dan yang lainnya, salah satu caranya dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah), karena dengan akad ijarah itu sebagai manusia dapat mempergunakan sebagian yang lainnya.

³⁷Ibid, h. 392.

4) Surah Ali-Imran (3) Ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

*Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.*³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah harus dibayarkan sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT dalam Surah di atas bahwa setiap pekerja yang bekerja harus dihargai dan diberikan upah, tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah. Memberikan upah seharusnya seimbang atau setimpal karena jika tidak dipenuhi maka bagi sipekerja/buruh ini adalah kezaliman, yang mana Allah SWT tidak menyukai kezaliman.

³⁸*Ibid*, h. 45.

5) Surah An-Nahl (16) Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.³⁹

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa tidak adanya diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama dan Allah akan memberikan imbalan (pahala) kepada mereka lakukan dan setimpal dengan amalan yang mereka lakukan dan akan lebih besar dengan apa yang mereka lakukan.

6) Surah Al-Kafi (18) Ayat 30

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ
أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ



³⁹Ibid, h. 214.

Artinya : “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”.⁴⁰

b. Landasan Al-Sunnah

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijarah* disyariatkan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan dengan jelas dan diberitahukan besar atau kecilnya upah pekerjaan. Hadits riwayat ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW berkata:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ (رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ إِقْطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)⁴¹

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri Radhiallahu’anh, sesungguhnya Nabi Shalallahu’Alaihi Wasallam bersabda: Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” (H.R Abdul Razaq sanadnya terputus, dan Al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifa) Kitab Bulughul Maram dan Ibnatul Ahkam

Hadits yang diriwayatkan Bukhari:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَأَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرُ عَاهَا عَلَى قَرَارٍ رِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ (صحيح البخاري)⁴²

⁴⁰Ibid, h. 237

⁴¹Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Salim Bahreisy, (Surabaya : Balai Buku, 1992), h. 189.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al-Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya Abu Hurairah radhiyallahu'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak Allah mengutus Nabi melainkan dia mengembala kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun mengembalakan dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk makkah".

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا إِلَّا جِيرَ أَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)⁴³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering".

c. Landasan Ijma'

Selain legalistas dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah di atas, ijarah diperoleh berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma'. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat

⁴²Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari*, Jilid 19, Hadits No.2262 (Jakarta : Pustaka Imam Asy Syafi, t.th), h. 132.

⁴³Abu 'Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadits No 2537 (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005) h. 398.

barang. Praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴⁵

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah: 1) pihak yang menyewa; 2) pihak yang menyewakan; 3) benda yang diijarahkan; dan 4) akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat *ijarah*.⁴⁶

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

⁴⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 105.

⁴⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 95.

⁴⁶ Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 105

- 1) *Sighat* ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad ijarah; yaitu:
 - a. Manfaat barang dan sewa; atau
 - b. Manfaat jasa dan upah.

Adapun menurut Jumhur Ulama, Rukun ijarah ada empat,⁴⁷ yaitu:

- 1) *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴⁸ Adapun yang disyaratkan dalam hal ini:⁴⁹
 - a. Baligh;
 - b. Berakal;
 - c. Dan atas kehendak sendiri
- 2) *Sighat* yaitu ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab qabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan

⁴⁷ Rachmat Safe'i, *Op.Cit*, h. 125

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 117.

⁴⁹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 188.

kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.⁵⁰ Adapun yang disyaratkan dalam hal ini:⁵¹

- a. Ijab qabul harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - b. Ijab qabul itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
 - c. Ijab qabul harus terjadi atas kesepakatan bersama.
- 3) *Ujrah* adalah imbalan sebagai bayaran (upah).⁵² *Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Adapun yang disyaratkan adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁵³
- 4) Manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Dengan ketentuan yang menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat.⁵⁴ Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan

⁵⁰Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 118.

⁵¹Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 189.

⁵²*Ibid*, h. 188

⁵³ Hendi Suhendi, *Loc.Cit*.

⁵⁴ Khumedi Ja'far, *Loc.Cit*.

masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*.⁵⁵

Adapun syarat *ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat

⁵⁵ Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 107.

dijadikan harga (*tsaman*) dalam jua beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.

- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

KHES menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan *ijarah* dalam Pasal 257-262. Pasal 257 menyebutkan:

“Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.”

Pasal 258:

“Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.”

Pasal 259:

“Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.”

Pasal 260:

- 1) Penggunaan benda *ijarah* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.
- 2) Jika penggunaan benda *ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261:

“Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.”

Pasal 262:

- 1) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal
- 2) Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsil adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

4. Macam-macam Ijarah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewamenyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah:

- a. Ijarah ‘Ayan (bersifat manfaat) dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- b. Ijarah ‘Amal (bersifat pekerjaan) Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.⁵⁶

5. Waktu Pembayaran Upah

Islam adalah agama *rahmatan lil ‘alamin*. Tidak ada secuil pun di muka bumi ini yang tak diatur atau diperhatikan dalam Islam. Demikian juga konteks hukum ketenagakerjaan/perburuhan, beberapa teks ayat suci Al-Quran, hadis maupun perjalanan sejarah kehidupan masyarakat Islam, banyak menyinggung masalah

⁵⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 426.

ketenagakerjaan/perburuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁷

Upah merupakan hak seorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁵⁸

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.⁵⁹ Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

⁵⁷ Darwis Anatami, *Op.Cit*, h. 209.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zaenal Arifin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 232.

⁵⁹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 189.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*” (QS Al-Maidah (5) : 1)⁶⁰

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*” (QS Al-Isro’ (17) : 34)⁶¹

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

أَعْطُوا الْاَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “*Berikanlah upah para pekerja sebelum keringatnya kering.*”

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman.”*

Dalil-dalil di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 84.

⁶¹ *Ibid*, h. 227

setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila kita ingin selamat dari murka Allah Swt. Dianggap suatu kezaliman apabila majikan tidak mengakhirkan atau memperlambat pemberian gaji pekerja/buruh padahal majikan mampu memberikan gaji tepat waktu. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.⁶²

Islam anti dengan kapitalisme dalam masalah ketenagakerjaan/perburuhan. Pasalnya dalam ideologi kapitalisme, buruh dipandang tidak lebih dari sekedar “mesin pencetak uang”, dengan keringatnya sebagai ‘bahan bakar’. Namun begitu, tidak serta merta Islam identik dengan sosialisme. Pada hal-hal tertentu, seperti masalah pengupahan Islam tetap mengenal ‘diskriminasi’ berdasarkan *skill* dan profesionalisme pekerja. Dengan kata lain, tidak ada prinsip ‘sama rasa, sama rata’ untuk masalah upah di dalam Islam.

Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Pada dasarnya segala bentuk bermuamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah.
- 2) Bermuamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

⁶² Darwis Anatami, *Op.Cit*, h. 210.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Yogyakarta : Mizan, 1993), h. 177.

- 3) Bermuamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
- 4) Bermuamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Negara, menurut Islam, sejatinya berperan laksana wasit yang menjaga aturan main perburuhan, termasuk di dalamnya mengenai kewajiban pengusaha secara suka rela mengembalikan ‘nilai lebih’ kepada pekerjanya. Negara perlu melakukan upaya paksa jika pengusaha tidak menjalankannya secara suka rela.⁶⁴

6. Etika dalam Bisnis Islam

a. Prinsip-Prinsip Bisnis Islam

Islam menghalalkan upah-mengupah yang termasuk juga bisnis. Namun, tentu saja sebagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Etika Bisnis Islam Menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, konsumen masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan, namun banyak para pelaku

⁶⁴ Darwis Anatami, *Op.Cit*, h. 209.

usaha/bisnis yang tidak lagi mementingkan aturan-aturan Islam dalam berbisnis, dalam artian hanya mengejar keuntungan duniawi semata. Dalam hukum Islam telah diatur beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang mencakup:

1) Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syaria-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyyah*.⁶⁵

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.⁶⁶ Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 8 :

⁶⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004), h. 30.

⁶⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfaeta, 2013), h. 46.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.⁶⁷

3) Prinsip Kehendak bebas

Prinsip kehendak bebas berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “*semua boleh kecuali yang dilarang*” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

4) Prinsip Tanggungjawab

Prinsip pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau manusia. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran,

⁶⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 86

pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁶⁸ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur'an surat Al-Muddassir (74) ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*.⁶⁹

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

⁶⁸ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, h. 181.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 460

5) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran yang dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁷⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.⁷¹

⁷⁰ Abdul Aziz, *Op. Cit*, h. 46.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 228

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti

bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.⁷²

7. Hubungan Kerja dalam Islam

Sebagaimana umat beragama yang bertujuan untuk menghantarkan manusia kejenjang kehidupan yang lebih sejahtera, Islam membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Dengan beribadah seseorang sudah merasa berhubungan dengan Sang Pencipta secara vertikal. Menyembah kepada-Nya dengan penuh ketaatan dan cinta sebagaimana dicontohkan dalam Sunnah Rasul. Aspek ibadah ini yang memberikan penghayatan kepada aspek muamalah agar berjalan dengan lancar dan terarah dengan koridor Islam.

Pada aspek ini manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di dunia fana ini. Saling tolong menolong, bantu membantu dan saling menerima dan saling member yang dalam doktrin Islam. Yang mana Islam mempunyai aturan-aturan dan etos kerja yang wajib dipatuhi dan dipedomani.⁷³

Adapun dalam hal ini untuk mencapai tujuan sangat diperlukan keadilan. Karena keadilan adalah ramuan penting mencapai *maqashid asy-syari'ah*, sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa

⁷²Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), h. 76.

⁷³Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 6.

keadilan. Islam sangat tegas dalam pengetasan kezaliman dari masyarakat. Kezaliman merupakan istilah yang menyeluruh mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkinan seseorang melupakan hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban pribadi mereka.⁷⁴

Adanya keadilan ini, diharapkan nantinya dapat menciptakan hubungan kerja yang Islami dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja. Adapun hak-hak dan kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja: adapun hak-hak dan kewajiban para pekerja adlah sebagai berikut:

1) Hak para pekerja

Adapun hak-hak para pekerja yang wajib dipenuhi adalah:

a. Hak memiliki pekerjaan yang sesuai

Islam menetapkan hak setiap individu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan potensi yang dimiliki.

b. Hak persamaan antara pria dan wanita dalam bekerja

Islam tidak melihat gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakan. Al-Qur'an menegaskan, hasil kerja dan kesungguhannya wanita pun dihargai sebagaimana pria.

⁷⁴ Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Penerjemah Lukman Hakim, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 5.

c. Hak memperoleh upah yang sesuai

Kaidah Islam menegaskan bahwa upah sesuai dengan pekerjaan. Tidak ada kezaliman, pengurangan atau tindakan anarki. Jika Islam menetapkan bahwa upah ditentukan berdasarkan pekerjaan, maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah upah yang ditentukan berdasarkan jenis suatu pekerjaan.

d. Hak cuti dan keringanan pekerja

Hak cuti biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja, hari libur dan faktor-faktor lain yang mengharuskan atau memungkinkan seseorang harus istirahat atau cuti.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”* (QS Al-Baqarah (2) : 286)

e. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan

Islam menetapkan hak jaminan dan perlindungan pekerja sejak empat belas abad yang lalu. Ketika masyarakat dunia sedang diselimuti kejahiliahan dan keeterbelakangan. Islam menetapkan hak ini di atas segalanya.

2) Kewajiban para pekerja

Adapun kewajiban para pekerja yaitu:

a. Amanah dalam kerja

Islam menilai bahwa memahami amanah kerja merupakan jebnis ibadah yang paling utama. Dalam bekerja agama Islam mengerahkn individu dan masyarakat untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan secara baik dan benar. Hal ini bias dilakukan jika karyawan bekerja secara profesinal dan jujur.

b. Mendalami agama dan profesi

Merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya. Menekuni dan memahami pekerjaan yakni pekerjaan dituntut agar senantiasa mengikuti dinamikan kerja. Ia dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. Hal ini benar dalam Firman Allah dalam Surat At- Taubah (9) ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

3) Hak dan Kewajiban pengusaha

Hak dan kewajiban para pekerja telah diketahui, maka perlu diketahui juga hak dan kewajiban para pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yang memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa material maupun non-material. Sedangkan kewajiban dari para pihak pengusaha terhadap para pekerja yaitu membayar upah atau gaji, karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh pekerja dan merupakan kewajiban para pengusaha terhadap pekerja.⁷⁵

Adapun kewajiban pengusaha untuk membayar upah kepada buruh, yang telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, bulanan ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda. Rasulullah bersabda:

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁷⁵ Izzudin Khatib At-Tamimi, *Bisnis Islam*, (Jakarta : Fikahati Aneka, 1995), h. 115.

وسلم : أَعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن
ما جه)⁷⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering".

Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang. Begitu juga dengan penagguhan pembayaran upah oleh pengupah, harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikannya.

Firman Allah dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara (26) ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ



Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

⁷⁶Abu 'Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadits No 2537 (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005) h. 398.

Ayat di atas merupakan jaminan bahwa upah karyawan akan dibayar sesuai akad yang telah disepakati bersama. Tidak saja upah pekerja itu harus dibayar secara adil, akan tetapi pelaksanaan pembayarannya juga tidak boleh ditunda, harus sesuai dengan kelaziman pembayaran upah yang berlaku atau sesuai dengan akad yang ada.

Hubungan kerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan motivasi, baik secara *indogen* maupun secara *eksogen* gabungan ini dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan sikap mental manusia. Sejauh mana masalah satu unsure tersebut lebih penting, sangat bergantung pada sifat dan pentingnya pekerjaan pegawai dan pekerjaan.⁷⁷

Hubungan kerja yang menyangkut pemeliharaan bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keterpaduan kerja sama, baik antara manusia dalam perusahaan maupun hubungannya dengan manusia yang berada di luar perusahaan.

C. Upah Menurut Hukum Indonesia

1. Pengertian Upah

Sebelumnya marilah lihat beberapa pengertian tentang upah yang berkembang menjadi konsep dan acuan teori pengupahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan

⁷⁷Abdurahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen SDM*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 153.

dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Selanjutkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan

pelanggaran hak asasi manusia, dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI KepMen No. 49 Tahun 2004 Pasal 1 tentang ketentuan skala upah, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas tentang upah, maka dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan *financial* langsung dibayarkan kepada tenaga kerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang dihasilkan.

2. Dasar Hukum Upah

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Pemburuhan.
- b. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang sama Nilainya.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- f. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
- g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah minimum dalam Rangka Keberlanagsungan Usaha dan Kesejahteraan Pekerja.
- h. Surat Edaran Manteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.01/Men/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981.
- i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.233/Men/2003 tentang Tata Cara Penagguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
- j. Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor Kep.231/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus.
- k. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.234/Men/2003. Tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu.

- l. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- m. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu.
- n. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- o. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- p. Keputusan Gubernur Lampung yang tertuang dalam SK No. G/813/III.05/HK/2014 tentang Besaran UMR/UMK Provinsi Lampung.

3. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah menurut ketentuan

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenagakerjaan.⁷⁸

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat kewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.⁷⁹

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan, jadipembayaran sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaansudah selesai.⁸⁰

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa upahsecara umum yaitu hak pekerja yang diterima dandinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan daripemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakuakn,sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenagakerjaan

⁷⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994), h. 56

⁸⁰ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 168

4. Sistem Pembayaran Upah dan Pengupahan

Sistem pengupahan menurut Hadari Nawawi dibedakan ke dalam dua bentuk yang terdiri dari:⁸¹

- a. Diberikan secara tetap
- b. Diberikan sewaktu-waktu atau tidak tetap

Sedangkan menurut Heidjrahman Suad Husnan sistem pengupahan yang umum diterapkan adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Sistem waktu

Pada sistem waktu besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, harian, mingguan atau bulanan. Sistem waktu ini biasanya jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya. Jadi, besarnya kompensasi hanya didasarkan pada lamanya bekerja.

*Keuntungan sistem upah menurut sistem waktu yaitu:*⁸³

- 1) Para pekereja tidak perlu terburu-buru di dalam menjalankan pekerjaan, karena banyaksedikitnya unit yang mampu mereka selesaikan tidak terpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Dengan

⁸¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2012), h. 373.

⁸² Heidjrahman Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2013), h. 140.

⁸³ Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*, <https://sistes.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-tenagakerja-langsung/sistem-upah-dan-tenga-kerja-langsung>, Akses 2 September 2014

demikian kualitas barang atau jasa yang di berikan akan terjaga.

- 2) Bagi para tenaga kerja yang kurang terampil, sistem upah ini dapat member ketenangan dalam bekerja, karena walaupun mereka kurang bisa menyelesaikan unit yang banyak, mereka akan tetap memperoleh upah yang sama dengan yang diterima oleh tenaga kerja lain.

Adapun kerugian sistem pengupahan menurut hasil sebagai berikut:

- 1) Para tenaga kerja yang terampil akan mengalami kekecewaan, karena kelebihan mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh upah yang lebih besar dibandingkan para pekerja yang kurang terampil, sehingga tenaga kerja yang terampil kurang bersemangat dalam bekerja.
- 2) Adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lamban, karena besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar-kecilnya upah yang mereka terima.

b. Sistem hasil

Sistem upah menurut unit hasil, yang menentukan besar-kecilnya upah yang diterima tenaga kerja, tergantung pada

banyaknya unit yang dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima.

Keuntungan sistem upah menurut unit hasil yaitu:

- 1) Para tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat kerja yang tinggi, dan akan menunjukkan kelebihan keterampilannya, karena besar-kecilnya unit yang dihasilkan akan menentukan besar-kecilnya upah yang akan mereka terima. Akibatnya produktivitas perusahaan meningkat
- 2) Adanya kecendrungan pekerja untuk bekerja lebih semangat, agar memperoleh upah yang lebih besar.

Adapun kerugian sistem pengupahan menurut hasil sebagai berikut:

- 1) Para pekerja akan bekerja terburu-buru sehingga kualitas barang atau jasa kurang terjaga.
- 2) Para pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang rendah, akibatnya mereka kurang mempunyai semangat kerja.
- 3) Sistem upah dengan insentif, yang menentukan besar-kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja, jumlah unit yang dihasilkan ditambah dengan insentif (tambahan upah) yang besar-kecilnya

didasarkan pada prestasi dan keterampilan kerja pegawai. Sistem upah menurut insentifsering dianggap sebagai gabungan antara sitem upah menurut waktu dengan sistem upah menurut unit hasil. Sistem ini diharapkan akan memperoleh keuntungan dari kedua sistem tersebut.

c. Sistem borongan

Pada sistem borongan ini pendapat besarnya pada volume pekerjaan dan lamanya mengerjakan. Upah borongan ini mengaitkan langsung kompensasi secara langsung dengan produksi yang dihasilkan. Besar kecilnya upah tergantung kecermatan dalam mengkalkulasi biaya borongan tersebut.

Pengupahan adalah salah satu aspek yang penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2003 bahwa *“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Maksudnya dalah dari penghidupan yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya sewajarnya.

Motivasi utama seorang pekerja/buruh bekerja di perusahaan atau disuatu usaha adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan karir serta meningkatkan penghasilan dari upah/gaji

merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh yang bersifat sensitif, tidak jarang sering menimbulkan perselisihan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlalu rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Ini disebut upah minimum bisa berwujud upah provinsi dan, kabupaten/kota, atau sektor.⁸⁴

5. Cara Pembayaran Upah Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

- a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat buruh biasa bekerja, atau di kantor perusahaan.
- b. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.
- c. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil

⁸⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 144-145

pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

6. Asas-asas Pengupahan

- a. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan diputus.⁸⁵
- b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.⁸⁶
- c. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah waktu kerja.⁸⁷
- d. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.⁸⁸
- e. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melakukan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) wajib membayar upah lembur.⁸⁹
- f. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan minimum.⁹⁰
- g. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaannya.⁹¹

⁸⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

⁸⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

⁸⁷ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸⁸ Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- h. Komponen upah terdiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.⁹²
- i. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.⁹³
- j. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah , dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.⁹⁴
- k. Dalam hal ini perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.⁹⁵
- l. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan sengaja pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun atau sejak timbulnya hak.⁹⁶

7. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah sebulan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2

⁹¹ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹² Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹³ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹⁴ Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹⁵ Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹⁶ Pasal 96 ayat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

dan 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:

- 1) Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- 2) Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) berlaku dalam satu wilayah kota/kabupaten.

Besaran gaji UMP Lampung periode 2018 tercantum di dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/564/V.07/HK/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2018. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Lampung M. RIDHO FICARDO tertanggal 01 November 2017.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut, Besaran Gaji UMP Lampung tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.074.673,27. Ketetapan besaran gaji UMP Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018, sebelumnya UMP Lampung periode tahun 2017 adalah Rp. 1.908.447,50. UMP (Upah Minimum Provinsi), dimana upah minimum provinsi ini merupakan batas minimal pengupahan yang berlaku di suatu Provinsi dalam satu tahun.⁹⁷

⁹⁷<http://www.google.com/amp/s/www.pengumuman.id/umr-lampung-provinsi/amp?espv=1>

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Gambaran Singkat Studio Junior Picture

1. Sejarah Singkat Berdirinya Studio Junior Picture

Studio Junior Picture adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa fotografi, yang memiliki dua owner yaitu Bastian Najah dan Rifan Wahyudi. Selain pemilik usaha mereka juga adalah fotografer utama di Studio Junior Picture, studio ini didirikan pada awal tahun 2015 dengan nama sebelumnya Ten Photography yang beralih nama sekarang menjadi Junior Picture, yang dulu terletak di Jln. Ratulangi-Kemiling dan kini telah berpindah di Jln. Nangka No.9, Waykandis. Pada awalnya Bastian dan Rifan bertemu dalam sebuah wadah organisasi fotografi yang berkembang di masyarakatnya kemudian saling mengenal satu sama lain dan akhirnya ingin membuat suatu usaha di dalam bidang fotografi yaitu dalam wedding fotografi atau foto pernikahan. Bastian dan Rifan memiliki tujuan yang sama dalam membangun suatu usahanya, tujuannya memaksimalkan dan memberdayagunakan hobi yang dimiliki untuk mencari suatu penghasilan kehidupannya.¹

¹ Wawancara dengan Pemilik Studio Junior Picture Bandarlampung Rifan Wahyudi pada tanggal 15 November 2018.

2. Visi dan Misi Studio Junior Picture

a. Visi Studio Junior Picture

Menjadikan Studio Junior Picture sebagai penyedia jasa foto dan video unggulan dengan seni dalam setiap moment dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga bersahabat, profesional dan penuh rasa tanggung jawab akan kepuasan konsumen.

b. Misi Studio Junior Picture

- 1) Memproduksi foto-foto yang menarik, yang pada akhirnya akan menjadi keindahan dalam setiap moment pernikahan.
- 2) Memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga cukup terjangkau.
- 3) Meningkatkan kualitas secara berkala sesuai perkembangan.
- 4) Memberikan kualitas SDM dan teknologi sesuai tuntutan konsumen.
- 5) Berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan.

3. Jenis Pekerjaan di Studio Junior Picture

Bidang usaha fotografi yang dijalankan oleh Studio Junior Picture berfokus kepada pernikahan. Jasa foto yang akan ditawarkan kepada para calon konsumen potensial terbagi atas beberapa kategori utama, yang masing-masing terdiri dari jasa utama yang ditawarkan

dan jasa tambahan yang mungkin akan diakomodir oleh kategori jasa tersebut :

a. Foto Studio

Kategori jasa ini akan mengakomodir segala kebutuhan konsumen yang berhubungan dengan foto studio (*indoor*) yang dilaksanakan di dalam studio. Bentuk jasa foto studio tersebut dapat berupa berbagai macam jenis, antara lain : pas foto, foto model, foto pasangan dan lain-lain. Harga yang ditawarkan Rp.100.000 - Rp.500.000.

b. Engangment (Pertunangan)

Engangment atau *pertunagan* adalah suatu pernyataan keinginan untuk menikah yang disampaikan calon suami kepada calon istri baik secara langsung ataupun melalui perantara pihak keluarga. Setelah kedua pihak laki-laki dan perempuan sepakat untuk saling menerima, maka terjadilah perjanjian untuk melangsungkan pernikahan. Harga yang dipasarkan Rp.1.000.000.-

c. Foto Pre-wedding

Foto yang dilakukan kedua calon pengantin sebelum hari pernikahan, foto pre-wedding dilakukan untuk berbagai tujuan salah satunya untuk menampilkan foto kedua mempelai pada undangan pernikahan mereka, sehingga tamu undangan yang di

undang dapat mengenal kedua mempelai. Harga yang ditawarkan Rp.3.000.000 – Rp.5.000.000.-

d. Foto Wedding (Pernikahan)

Sebuah foto yang dilakukan pada upacara pengikatan janji suci yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan maksud untuk mengabadikan moment pernikahan yang secara resmi telah dilakukan. Pada saat foto wedding ini lah biasanya Studio Junior Picture membutuhkan Freelance Fotografer sebagai tenaga bantu untuk fotografer utama dari studio. Harga yang ditawarkan Rp.5.000.000 – Rp.8000.000.-

e. Foto Post Wedding

Foto post wedding (*kebalikan dari pre-wedding*) yaitu sesi foto pengantin setelah keduanya telah resmi diikat dalam janji suci perkawinan melalui prosesi ijab dan kabul. Harga yang ditawarkan Rp.3.000.000 – Rp.5.000.000.-

4. Struktur Bagan Kerja

Struktur bagan kerja yang ada pada Studio Junior PICTURE mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing yaitu :

a. Owner

Owner adalah pemilik usaha yang bertanggung jawab dalam:

- 1) Sebagai pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab perkembangan maju mundurnya Studio Junior Picture.

- 2) Berwenang mengambil keputusan yang akan dijalankan oleh Studio Junior Picture.
- 3) Bertanggungjawab atas masalah jika konsumen melakukan komplain atas jasa yang diberikan Studio.

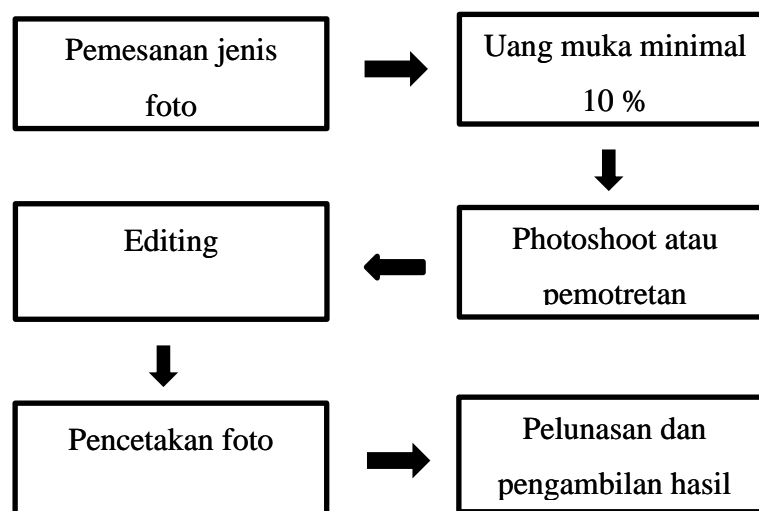
b. Admin Marketing

Fungsi dari admin marketing adalah:

- 1) Menjalankan kegiatan administrasi dan bertanggung jawab mengenai baik buruknya administrasi.
- 2) Mengadakan promosi
- 3) Mencari konsumen

c. *Freelance fotografer* adalah pekerja harian yang membantu fotografer saat mendokumentasikan acara pada saat waktu tertentu.

5. Proses Produksi Usaha Studio Junior Picture



Sumber: Proses produksi di Studio Junior Picture tahun 2018

B. Pelaksanaan Sistem Upah di Studio Junior Picture

Upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada pekerja. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah melakukan pekerjaan itu selesai dikerjakan. Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan.

Sistem usaha yang dijalankan Studio Junior Picture hanya mempunyai dua fotografer utama yang sekaligus menjadi pemilik studio tersebut. Freelance dibutuhkan di dalam Studio Junior Picture apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan banyak fotografer yang tidak dapat dilakukan hanya dengan 2 orang fotografer seperti dalam foto pernikahan atau pertunangan yang membutuhkan 5 fotografer atau lebih dan apabila terdapat pekerjaan *double* atau *triple job* pada hari dan tanggal yang sama, biasanya pekerjaan yang diterima Studio Junior Picture dalam sebulan memiliki jadwal foto pernikahan untuk setiap minggunya dan biasanya memiliki *double* ataupun *triple job* dalam satu hari. Para freelance

fotografer ada yang bekerja hampir disetiap minggunya dan ada juga yang tidak setiap minggunya.

Setiap pekerjaan yang dilakukan freelance fotografer tersebut telah ditentukan besarannya, masing-masing freelance mendapatkan upah yang sama dalam setiap pekerjaannya. Namun besaran upah ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan oleh freelance tersebut, Upah yang diterima freelance fotografer untuk foto pernikahan yang meliputi akad dan resepsi sebesar Rp. 500.000/orang, bila dalam foto pernikahan hanya akad ataupun resepsi saja sebesar Rp. 350.000/orang, dan untuk foto lamaran sebesar Rp. 350.000/orang.²

Pembayaran yang dilakukan oleh pemilik studio terhadap para freelance fotografer tidak langsung dibayarkan pada saat setelah melakukan pekerjaannya selesai akan tetapi ditangguhkan setelah pelunasan yang dilakukan oleh konsumen. Setiap pekerjaan dalam foto pernikahan tidak dapat selesai dalam waktu sehari dikarenakan masih ada tahap-tahap proses yang dilakukan oleh pemilik Studio Junior Picture seperti proses editing dan pencetakan yang memakan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya. Setiap konsumen di Studio junior picture hanya melakukan pembayaran uang tanda *booking* jadwal atau hari sebesar 10% dari paket harga yang ditawarkan kepada konsumen, yang kemudian uang

² Wawancara dengan Pemilik Studio Junior Picture Bandarlampung Rifan Wahyudi pada tanggal 15 November 2018.

tersebut digunakan untuk melakukan pencetakan foto, akomodasi, dan lain-lain.³

Pada hasil wawancara dengan Rifan Wahyudi selaku pemilik studio Junior Picture yang menjadi sumber penelitian mengatakan upah dibayarkan kepada freelance fotografer setelah project foto tersebut selesai biasanya paling lama 3 bulan atau bisa juga lebih cepat, karena setiap hasil foto pernikahan tersebut harus melakukan editing dan pencetakan yang ditumpuk kemudian di cetak bersamaan.⁴

Setelah itu peneliti masih menanyakan kepada Bastian Najah yang juga pemilik Studio Junior Picture yaitu upah freelance ditangguhkan sampai semua pekerjaan terselesaikan dalam 3 bulan terakhir karena pembukuan di Studio Junior Picture 3 bulan sekali. Setelah semua foto diambil kemudian dibayarkan pelunasan oleh konsumen, barulah para freelance dibayarkan upahnya berdasarkan jenis pekerjaan yang diberikan.⁵

Selain pemilik dari studio peneliti melakukann wawancara terhadap freelance fotogarfer yang bekerja di Studio Junior Picture :

Vicky Hazmi salah satu freelance fotografer di Bandarlampung yang telah bekerja hampir 2 tahun sebagai freelance di Studio Junior Picture mengatakan upahnya memang tidak menentu waktu pembayarannya,

³ Wawancara, dengan Pemilik Studio Junior Picture Bandarlampung, Bastian Najah, pada tanggal 15 November 2018.

⁴ Wawancara, dengan Pemilik Studio Junior Picture Bandarlampung, Rifan Wahyudi, pada tanggal 15 November 2018.

⁵ Wawancar, dengan Pemilik Studio Junior Picture Bandarlampung, Bastian Najah, pada tanggal 15 November 2018.

paling cepat 2 minggu dan juga bisa lebih lama, namun dia masih bekerja di studio karena memang pemilik studio adalah saudaranya.⁶

Freelance yang bernama Ridho Hamidhan, merupakan freelance yang bekerja baru 5 bulan. Menurutnya upah yang diterima memang lama sebagai freelance fotografer di Studio Junior picture karena memang tidak ada tanggal pasti waktu pembayaran dalam perjanjiannya jadi yah diterima saja kapan waktunya.⁷

Freelance yang bernama Muhammad Shehan, merupakan Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung yang bekerja sebagai freelance di Studio Junior Picture selama 1 tahun lebih mengatakan bekerja sebagai freelance merupakan sampingan dari kesibukan kuliahnya dan upah yang diterima hanya untuk memenuhi kebutuhan tambahan untuk kuliah saja.⁸

Freelance yang bernama Nando Saputra, ikut sebagai freelance fotografer di Studio junior picture karena memang memiliki hoby dalam fotogarfi oleh karena itu tertarik untuk bekerja sebagai freelance untuk mengisi hari libur kuliah, Adapun upah dari freelance fotografer yang diterima hanya sebagai uang tambahan.⁹

Aditya Dimas memiliki studio sendiri di daerah Bandarlampung akan tetapi bila dijadwal studio kosong atau tidak memiliki pekerjaan pada

⁶Wawancara, dengan Freelance Studio Junior Picture Bandarlampung, Vicky, pada tanggal 18 November 2018.

⁷Wawancara, dengan Freelance Studio Junior Picture Bandarlampung, Ridho Hamidhan, pada tanggal 18 November 2018.

⁸ Wawancara, dengan Freelance Studio Junior Picture Bandarlampung, Shehan, pada tanggal 18 November 2018.

⁹ Wawancara, dengan Freelance Studio Junior Picture Bandarlampung, Nando, pada tanggal 18 November 2018.

waktu dibutuhkan oleh studio junior picture maka adit menerima juga sebagai freelance fotografer di Studio Junior Picture, upah yang diterima dari Studio Junior Picture tak ada waktu tertentu.¹⁰

Aulia Rahman sudah menjadi freelance fotografer selama 4 tahun sebagai mata pencariannya dan dia tidak hanya menjadi bergantung pada freelance di Studio Junior Picture saja dia menerima semua tawaran freelance fotografer dari pihak mana saja untuk mengisi jadwalnya yang kosong. Adapun waktu pembayaran upah yang diterima dari Studio Junior Picture sedikit lebih lama dibandingkan di Studio lainnya.¹¹

Freelance yang bernama Arifal Paslah bekerja sebagai pegawai apoteker di Daerah Bandarlampung, Namun dia juga merupakan salah satu freelance fotografer di Studio Junior Picture. Dia bekerja sebagai freelance fotografer dikarenakan memiliki hoby dibidang foto dan untuk mengisi hari libur kerjanya.¹²

Freelance yang bernama Putra Hidayat bekerja di Studio Junior Picture sudah 6 bulan, dia bekerja sebagai freelance untuk belajar sekaligus menambah pengalamannya dalam hal fotografi khususnya dibidang fotografi pernikahan.¹³

¹⁰ Wawancara, dengan Freelance Studio Junior Picture Bandarlampung, Aditya, pada tanggal 25 November 2018.

¹¹ Wawancara, dengan Freelance Studio Junior Picture Bandarlampung, Aulia, pada tanggal 25 November 2018.

¹² Wawancara, dengan Freelance Studio Junior Picture Bandarlampung, Arifal, pada tanggal 25 November 2018.

¹³ Wawancara, dengan Freelance Studio Junior Picture Bandarlampung, Putra, pada tanggal 25 November 2018.

Seperti sudah dijelaskan dalam sistem pengupahan terdiri dari tiga yaitu: sistem waktu, sistem hasil, dan sistem borongan. Sedangkan dalam praktik sistem pengupahan di Studio Junior Picture menggunakan sistem borongan, pekerjaan yang dilakukan freelance fotografer dikompensasikan berdasarkan jenis pekerjaan dan dalam satu hari di Studio Junior Picture. Di Studio Junior Picture, freelance fotografer bukanlah pekerja tetap melainkan hanya pekerja lepas harian dan tanpa ada ikatan kontrak mengikat dalam waktu tertentu. Upah pekerja seharusnya dibayarkan setelah mengambil manfaat dari tenaga yang disewa atau setelah pekerjaannya terselesaikan dengan baik. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.

Sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture kepada para pekerja freelance adalah menanggung upah para freelance fotografer sampai pelunasan dari konsumen, dengan proses menumpuk hasil dari foto pernikahan selama 3 bulan terakhir, setelah proses editing selesai kemudian proses pencetakan bersamaan baru lah konsumen membayar lunas atas jasa yang dilakukan Studio Junior Picture. Pada saat konsumen melunasi pembayaran kemudian pemilik studio membayar upah para freelance fotografer yang bekerja di Studio Junior Picture.

BAB IV

ANALISI DATA

A. Sistem Pengupahan Pada Jasa Freelance Fotografer di Studio Junior Picture

Islam menghalalkan upah-mengupah yang termasuk juga bisnis. Namun, tentu saja sebagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT.

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara bahasa (etimologi) kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijrah* adalah menjual manfaat. Sedangkan secara istilahi (terminologi) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Seperti sudah dijelaskan dalam sistem pengupahan terdiri dari tiga yaitu: sistem waktu, sistem hasil, dan sistem borongan. Sedangkan dalam praktik sistem pengupahan di Studio Junior Picture menggunakan sistem borongan, pekerjaan yang dilakukan freelance fotografer dikompensasikan berdasarkan jenis pekerjaan dan dalam satu hari di Studio Junior Picture. Di Studio Junior Picture, freelance fotografer bukanlah pekerja tetap melainkan hanya pekerja lepas harian dan tanpa ada ikatan kontrak mengikat dalam waktu tertentu. Upah pekerja seharusnya dibayarkan setelah mengambil manfaat dari tenaga yang disewa atau setelah pekerjaannya terselesaikan dengan baik. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.

Sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture kepada para pekerja freelance dengan cara menanggungkan upah para freelance fotografer sampai pelunasan dari konsumen, dengan proses menumpuk hasil dari foto pernikahan selama 3 bulan terakhir, setelah proses editing selesai kemudian proses pencetakan bersamaan baru lah konsumen

membayar lunas atas jasa yang dilakukan Studio Junior Picture. Pada saat konsumen melunasi pembayaran kemudian pemilik studio membayar upah para freelance fotografer yang bekerja di Studio Junior Picture. Sebagaimana di ungkapkan oleh salah satu pemilik Studio Junior Picture bahwasanya

“Upah freelance ditangguhkan sampai semua pekerjaan terselesaikan dalam 3 bulan terakhir karena pembukuan di Studio Junior Picture 3 bulan sekali. Setelah semua foto diambil kemudian dibayarkan pelunasan oleh konsumen, barulah para freelance dibayarkan upahnya berdasarkan jenis pekerjaan yang diberikan”.

B. Sistem Pengupahan Pada Jasa Freelance Fotografer Menurut Perspektif Hukum Islam

Pembahasan ini penulis mencoba menganalisis sistem pengupahan freelance fotografer yang dilaksanakan di Studio Junior Picture ini dengan perspektif hukum Islam.

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Tidak ada secuil pun di muka bumi ini yang tak diatur atau diperhatikan dalam Islam. Demikian juga konteks hukum ketenagakerjaan/perburuhan, beberapa teks ayat suci Al-Quran, hadis maupun perjalanan sejarah kehidupan masyarakat Islam, banyak menyinggung masalah ketenagakerjaan /perburuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara bahasa (etimologi) kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad*

yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *ijrah* adalah menjual manfaat. Sedangkan secara istilahi (terminologi) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Upah merupakan hak seorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pada hukum akad terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Adapun salah satu asa dalam akad yaitu

asas kerelaan (*Mabda' Ar-rada'iyah*). Berdasarkan Firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ..... ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Dalam hal ini pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture tidak berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak berdasarkan hasil wawancara salah satu freelance fotografer bahwa

“Upah yang diterima memang lama sebagai freelance fotografer di Studio Junior picture karena memang tidak ada tanggal pasti waktu pembayaran dalam perjanjiannya jadi yah diterima saja kapan waktunya”.

Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk bermuamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah.
- 2) Bermuamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Bermuamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
- 4) Bermuamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Negara, menurut Islam, sejatinya berperan laksana wasit yang menjaga aturan main perburuhan, termasuk di dalamnya mengenai kewajiban pengusaha secara suka rela mengembalikan ‘nilai lebih’ kepada pekerjanya. Negara perlu melakukan upaya paksa jika pengusaha tidak menjalankannya secara suka rela.

Cara pembayaran upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah bahwa

“Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu”.

“Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17

dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja”.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai. Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”*

(QS Al-Maidah (5) : 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”* (QS Al-Isro’ (17) : 34)

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah para pekerja sebelum keringatnya kering.”

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman.”

Dalil-dalil di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila kita ingin selamat dari murka Allah SWT. Sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture dengan cara menangguhkan upah freelance fotografer dianggap suatu kezaliman padahal pemilik Studio mampu memberikan gaji tepat waktu. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penyusun lakukan, akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem pengupahan terhadap freelance fotografer yang terjadi di Studio Junior Picture Bandarlampung perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan di Studio Junior Picture menggunakan sistem borongan, pekerjaan yang dilakukan freelance fotografer dikompensasikan berdasarkan jenis pekerjaan dan dalam satuan hari di Studio Junior Picture. Besaran upah yang diterima freelance fotografer untuk foto pernikahan yang meliputi akad dan resepsi sebesar Rp. 500.000/orang, bila dalam foto pernikahan hanya akad ataupun resepsi saja sebesar Rp. 350.000/orang, dan untuk foto lamaran sebesar Rp. 350.000/orang. Sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture kepada para pekerja freelance dengan cara menanggihkan upah para freelance fotografer sampai pelunasan dari konsumen, dengan proses menumpuk hasil dari foto pernikahan selama 3 bulan terakhir, setelah proses editing selesai kemudian proses pencetakan bersamaan baru lah konsumen membayar lunas atas jasa yang dilakukan Studio Junior Picture. Pada saat konsumen melunasi

pembayaran kemudian pemilik studio membayar upah para freelance fotografer yang bekerja di Studio Junior Picture.

2. Pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture belum sesuai dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang *batil*, karena dapat merugikan salah satu pihak. Sistem pengupahan di Studio Junior Picture menggunakan sistem borongan, pekerjaan yang dilakukan freelance fotografer dikompensasikan berdasarkan jenis pekerjaan dan dalam satuan hari di Studio Junior Picture diperbolehkan akan tetapi pengupahan yang dilakukan di Studio Junior Picture dengan cara menangguhkan upah freelance fotografer dianggap suatu kezaliman padahal pemilik Studio mampu memberikan gaji tepat waktu. Oleh karena itu menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu tidaklah diperbolehkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemilik Studio Junior Picture yang melakukan pengupahan terhadap jasa freelance fotografer adalah sebagai berikut:

1. Upah freelance fotografer merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemilik Studio Junior Picture. Upah seharusnya dibayarkan secepat-cepatnya, setelah para freelance melakukan atau melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga tidak merugikan para pihak freelance yang telah melakukan pekerjaan/kewajibannya, karena menunda pembayaran upah terhadap pekerja sedangkan pengusaha mampu membayar adalah suatu kezaliman.
2. Melihat kondisi saat ini, maka setiap pengusaha agar bertindak adil terhadap para pekerja karena para pengusaha yang memiliki kekuasaan atas upah. Jangan sampai dalam usaha yang dijalankan tidak menjalankan asas keadilan, pengusaha haruslah mengikuti aturan dalam bisnis Islam agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata.
3. Sistem Pengupahan Islam, menyebutkan, prinsip perhitungan besaran gaji sesuai syariah. *Pertama*, prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran gaji. *Kedua*, manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dan apabila pekerjaan telah selesai dengan baik, upah haruslah dibayarkan secepatnya.
4. Fotografer dalam melakukan editing sebaiknya untuk tidak memanipulasi hasil foto seperti merubah bentuk wajah, menghilangkan keriput wajah ataupun mencerahkan warna kulit.

5.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonseia*, IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung : Alfaeta, 2013
- Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Abdurahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen SDM*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006
- Abu 'Abdullah bin Yazid al-Quzwani ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadits No 2537 Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005
- Ahmad Azhar Basyri, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Yogyakarta : Mizan, 1993
- Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah Anwar Rasyidi, Semarang : Toha Putra, 1992
- Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidudpan Ekonomi)*, Mazahib, Vol.IV, No. 2, Desember 2007
- Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2015
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994
- Darwis Anatami, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing*, al-'Adalah, Vol 13, No.2, 201
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta:PT Gramedia, 2011
- Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2012
- Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Heidjrahman Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*, https://sistes.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-tenagakerja-langsung/sistem-upah-dan-tenga_kerja-langsung, Akses 2 September 2014
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Salim Bahreisy, Surabaya : Balai Buku, 1992
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari*, Jilid 19, Hadits No.2262 Jakarta : Pustaka Imam Asy Syafi, t.th
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqiyah*, Cet.Pertama, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2001
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontenporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012
- Izzudin Khatib At-Tamimi, *Bisnis Islam*, Jakarta : Fikahati Aneka, 1995
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2009
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- M. Tamyiz Muharrom, *Kontrak kerja : Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengebangan SDM*, dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X, Yogyakarta: Program Studi Syariah FIAI UII, 2003
- M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia, 2009
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta : CV Rajawali, 2000
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Penghantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Mohammad Rusfi, Filsafat Harta : *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah, IAIN RIL, Vol. XIII, No. 2, 2016
- Muhammad Pabundun Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Muhammad Syakir Aula, *Asurasi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. Pertama, Jakarta : Gema Insani Press, 2004
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Ekosiana, 2004
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001
- Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-4, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, Bandung: PT. Alma’arif, 1987
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Edisi Baru*, Jakarta : Pustaka Fisafat, 2006
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bina Aksaral, 2007
- Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Psuat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2015
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Umar Chapra, *Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Penerjemah Lukman Hakim, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan Zaenal Arifin, Gema Insani Press, 2001